

---

## **GERAKAN NU DALAM MEMAHAMI AJARAN ISLAM DARI TRADISIONALME KE POST TRADISIONALME**

Muhammadong<sup>1</sup>, Lukman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Makassar

<sup>2</sup>Universitas Negeri Makassar

Pos-el : [muhammadong74@yahoo.com](mailto:muhammadong74@yahoo.com)<sup>1)</sup>  
[lukmanalipawellangi@gmail.com](mailto:lukmanalipawellangi@gmail.com)<sup>2)</sup>

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adaah untuk Gerakan tradisionalme menuju post tradisionalisme yang digagas oleh NU yang merupakan bentuk pembaharuan pemikiran supaya dapat mewujudkan eksistensinya dalam bernegara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan berbagai kajian pustaka yang berkaitan dengan NU dan segala aspek persoalannya. Adapaun hasil yang ditemukan bahwa gerakan NU dalam memahami ajaran Islam selalu konsisten pada budaya tradisionalisme yang dimiliki sehingga dapat dapat mengembangkan ke ajaran postradisionalisme. Gerakan tradisional yang dikembangkan merupakan bentuk kesadaran warga nahdiyyin untuk mengembangkan tradisi yag dimiliki sebagai simbolitisme agar dapat menerapkan kuasi ideologi. Dalam dekade tahun 2000-an kaum intelektual muda NU mulai mengembangkan kajian pemikirannya ke post tradisionalme untuk merespon fenomena kekinian sehingga NU mampu mengambil peran dalam memajukan Negara dalam bingkai keislaman. Post tradisionalme yang digagas bukan merupakan antitesa dari gerakan tradisonalme akan tetapi sebagai bentuk pepaduan dalam menjawab tantangan zaman.*

**Kata kunci:** Gerakan, NU, Tradisionalisme, Post Tradisionalisme.

### **Abstract**

*The purpose of this research is for the traditional movement towards post traditionalism initiated by NU which is a form of renewal of thought in order to realize its existence in the state. The method used is a qualitative approach with a variety of literature review approaches related to NU and all aspects of its problems. The results show that the NU movement in understanding Islamic teachings is always consistent with its traditionalist culture so that it can develop into post-traditionalism teachings. The traditional movement that has been developed is a form of awareness of the nahdiyyin people to develop their own traditions as symbolism in order to apply quasi ideology. In the 2000s, NU's young intellectuals began to develop their thought studies into post-traditionalism to respond to current phenomena so that NU was able to take a role in advancing the State in an Islamic frame. The post-traditionalism that was initiated was not the antithesis of the traditional movement but as a form of integration in responding to the challenges of the times.*

**Keywords:** Movement NU, Traditional, Post Traditional

---

## **PENDAHULUAN**

Kelahiran NU pada tahun 1926 yang merupakan gagasan dari beberapa tokoh-tokoh nahdliyyin yang pada umumnya berada di Jawa Timur dapat dikatakan sebagai cara dalam memajemen ajaran agama

secara budaya yang berkembang sejaka Islam masuk di nusantara. Diantara sebab kelahiran NU adalah adanya reaksi terhadap lahirnya organisasi Islam modern di Indonesia, yakni Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912. Jika Muhammadiyah disebut sebagai organisasi pembaruan, maka NU mengklaim sebagai penjaga ajaran tradisi dengan mengambil kebiasaan lokal dan dapat diterima sebagai kelompok ajaran Islam yang mengembangkan budaya..

NU sebagai organisasi tradisional sangat sulit untuk dibantah karena ciri khasnya yang selalu mempertahankan kebiasaan dulu yang selalu sejalan dengan nilai-nilai agama. Hasil pengamatan terhadap masalah sosial keagamaan di Indonesia yang berkaitan dengan NU, selalu menganggap bahwa organisasi tersebut merupakan penjabaran ajaran Islam melalui nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, NU secara umum digambarkan sebagai organisasi yang menampakkan dirinya sebagai identitas tradisional, diantaranya konservatif dan tertutup. Gambaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa warga NU dan anggotanya yang pada umumnya tinggal di pedesaan, tampak sangat kental dengan adat istiadat tradisional. Misalnya cara berpakaian mereka kenakan yang terkesan ketinggalan jaman, dan dalam tata cara peribadatan mereka lebih senang memilih aliran konservatif, seperti shalat jumat dengan dua azan, niat shalat dilafalkan, shalat subuh dengan qunut, pembacaan tahlil dan talqin untuk orang yang meninggal, zikir jamaah, peringatan maulid dan sebagainya.

Gerakan di atas merupakan fenomena umum kalangan generasi tua NU, yang memang didefinisikan sebagai kelompok tradisional Islam. Kelompok tradisional memahami dan mengamalkan hukum islam atau fiqh, harus mengacu kepada hasil pemikiran salah satu dari beberapa pendapat Imam Mazhab. Selain itu generasi tua kaum Nahdliyin memahami dan mengamalkan agama didasarkan atas penafsiran klasik terhadap agama yang dirumuskan secara baku dalam buku-buku yang mengadopsi ajaran tradisional, yang sering disebut kitab kuning.

Dalam satu dasawarsa terakhir ini, muncul penomena baru dikalangan kaum Nahdiliyin, sebuah gerakan pembaruan yang dilakukan generasi NU. Mereka melakukan pembaruan wacana tentang berbagai isu keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan global. Pembaruan dilakukan dengan merespon wacana lama yang tradisional, konservatif dan tertutup yang telah lama berkembang dikalangan nahdiliyin sejak kelahiran organisasi NU pada tahun 1926. Gelombang wacana baru dikalangan kaum Nahdhiyyin tersebut, menemukan momentumnya pada saat perhelatan muktamar ke-26 NU di Situbondo Jawa Timur pada tahun 1984, yang ditandai dengan pembalikan arah

gerakan NU dari gerakan politik ke gerakan kultural, ataupun apa yang dikenal dengan momentum kembali ke khitbah 1926, dimana NU merupakan organisasi yang memperjuangkan aspirasi umat Islam, yang dipelopori oleh KH. Abdul Rahman Wahid (Gusdur). Momentum ini menjadi starting poin bagi bergulirnya pemikiran-pemikiran di kalangan Nahdhiyyin sebagai respon konsepsional menyikapi tuntutan zaman tanpa keluar dari akar tradisi dan ideologi ahlusunnah waljamaah, bahkan konsepsi Islam ahlusunnah waljamaah kembali dikalaborasi dengan tradisi lokal dengan kemasan yang lebih maju dan dinamis. Loncatan ini kemudian dapat disebut dengan post tradisionalisme.

NU yang didirikan beberapa pemuka agama dan Ulama tradisional Jawa Timur. Pembentukannya sering diargumentasikan sebagai raksi definisi yang mengarah sebagai kegiatan pemuka modernis dari kalangan Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat dari aksi dari partai serikat Islam. Kelahiran NU sebagai reaksi dari gerakan Muhammadiyah yang mengutamakan aktivitasnya pada aspek edukasi ataupun kepedulian masyarakat. diantaranya, membuat lembaga pendidikan dengan nuansa Eropa, mendirikan klinik serta tempat penampungan anak. Hanya saja, pada aspek akidah dan ibadah cenderung bersifat revivalis dan puritanik. Dalam prakteknya, Muhammadiyah selalu tidak sejalan atas budaya local masyarakat dan tidak sepaham dengan ulama NU.

Berbeda dengan Muhammadiyah, Sarekat Islam yang lahir pada tahun 1912 selalu mengatas namakan wong cilik terlebih kepada pedagang dari kaum muslim yang selalu berkompetisi dengan pedagan cina dan pada akhirnya menjadi suatu kelompok tersendiri untuk membela kepentingan bangsa. Karena mempunyai banyak pengikut, maka Sarekat Islam memperoleh simpati banyak kalangan dari berbagai elemen masyarakat mulai masyarakat pedesaan, masyarakat partisan dan sudah mengakar. dengan demikian serikat Islam dapat menjadi saingan khususnya Ukama Nahdhiyyin yang mempertahankan budaya dan dimotori oleh Ulama.

Keberadaan Kyai dalam Organisasi NU dapat menjadi pionir melebihi seorang guru. Maka, posisinya dapat menjadi Mursyid dalam ritual keagamaan supaya dapat mengimplementasikan ajaran agama ke dalam hidup mereka. Kiy terkadang bertugas melaksanakan kegiatan keagamaan dan memanjatkan doa untuk keselamatan bersama supaya masyarakat dapat menemukan kesejahteraan dalam hidupnya. Seorang kiy mempunyai karamah tersendiri yang sangat dipercaya oleh masyarakat dan pengaruhnya sangat luas. Bahkan kiy terkadang mengajarkan thariqat yang dapat lebih mendekatkan masyarakat kepada

tuhannya. Dari ajaran tersebut menuai berbagai pengikut dari berbagai kalangan yang dinilai ketaatannya sangat tinggi.

Pesantren tidak lain dari ciri khas organisasi NU yang mengembangkan nilai-nilai pendidikan yang bernuansa islami. Pesantren dan NU merupakan perpaduan nilai pendidikan dengan religious sehingga santri selalu mengedepankan aspek akhlak dalam melakukan intraksi sehingga selalu mendapat respon positif dari masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola NU selalu berafiliasi dengan pemerintah sehingga perkembangannya sangat dinamis mengikuti keadaan.

## **METODE**

Dari segi jenis yang diteliti maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan menggambarkan paham yang dikembangkan oleh NU. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif karena permasalahan yang diteliti bersifat fenomenologis. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang diteliti yang menyangkut persoalan budaya tradisionalisme yang dimiliki agar dapat dikembangkan dalam budaya post tradisionalisme.

Tujuan dari penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar dapat menjelaskan secara mendalam terhadap gejala personalitas yang diteliti atau kelompok agar tanda-tanda yang ada di dalamnya dapat diketahui. NU merupakan organisasi keagamaan yang didalamnya tentu mencakup person yang mengambil peran sehingga dapat mengembangkan paham tradisionalisme ke paham post tradisionalisme. Paham-paham tersebut merupakan gejala yang harus dikembangkan dalam penelitian ini sehingga ditemukan pemahaman yang utuh terhadap suatu persoalan. Penelitian semacam ini pernah dikembangkan oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu (a) latar alamiah yang dimiliki; (b) manusia sebagai alat atau instrument yang diteliti (c) analisis data yang diteliti dapat dikembangkan secara induktif (d) teori yang dikembangkan merupakan teori dasar dasar agar tidak ditemukan kesulitan dalam penelitian.

Penelitian ini ditujukan agar dapat lebih memahami secara mendalam tentang organisasi NU sebagai lembaga yang bergerak dibidang dakwah dan pendidikan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis keagamaan dengan melihat sistem paham yang dikembangkan organisasi tersebut agar dapat mentransformasikan pemahamannya dari budaya tradisionalisme menuju budaya post tradisionalisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kelahiran NU Sebagai Organisasi

Muncul anggapan bahwa bahwa NU didirikan sebagai reaksi dari ulama tradisional atas berkembangnya pengaruh muhammadiyah dan sarekat Islam yang secara tidak langsung dapat memarginalkan peran kiyai dan masyarakat. NU lahir sebagai reaksi dari kaum revivalis dan sarekat islam sedang gencar mengembangkan pengaruhnya disamping sebagai respon atas perubahan peta politik Islam dan gerakan keagamaan pada dunia internasional.

Bermula pada bulan pebruari Tahun 1924, pemerintah Mustafal Kemal Attaturk di Turki menghapuskan jabatan khalifah atau sistem khilafah dalam pemerintahan. Hal ini mendorong lahirnya diskursus tentang teori politik Islam dan gerakan politik untuk membangun institusi Pan Islami yang baru. Gelar khalifah menunjukkan klaim mereka sebagai pengganti Nabi yang menyebabkan kewenangan penuh dapat disandang. Pergantian model kepemimpinan yang dulunya mengadopsi model khalifah, umat Islam merasa termarjinalkan oleh penjajah sehingga eksistensi umat islam kehilangan wibawa sehingga muncul aspirasi untuk mengadopsi model kepemimpinan yang simbolik yang dapat membawa kepada perubahan. Model kepemimpinan NU menjadi inspirasi yang dapat membawa kepada perubahan dikalangan nahdliyyin.

Gagasan itu kemudian ditindak lanjuti pada tahun 1924 untuk melakukan pertemuan sehingga terwujud suatu gagasan. Tentu yang menginisiasi para ulama terutama dari Timur Tengah. Maka muncul lahulam terkenal misalnya Muh. Rasyid Ridha sebagai pemikir pembaharu untuk melakukan pertemuan dengan ulama Muhammadiyah dan NU. Namun demikian, karena faktor internal yang terjadi di Mesir menyebabkan persiapan konres harus dibatalkan dan pertemuannya terpaksa ditunda sampai pada tahun 1926 atau dua tahun kemudian. Namun semangat untuk mengusung gagasan pembaharuan tetap menjadi impian para Ulama yang bermukim di Indonesia.

Ibnu Sa'ud menilai bahwa rencana pertemuan yang dilaksanakan di Mesir tidak lain dari kudeta yang akan terjadi bagi Raja Fuad pada waktu itu sehingga eksistensinya sebagai penguasai dapat dihilangkan. Oleh karenanya, diselenggarakanlah pertemuan yang dilaksanakan di Arab saudi selama juni-juli 1926, dengan alasan membicarakan tentang urusan haji, namun faktanya ia berusaha mendapatkan legitimasi bagi kekuasaannya atas hijaz. Kedua kongres yang hampir bersamaan itu, menunjukkan adanya persaingan untuk meraih kedudukan sebagai pemimpin seluruh umat Islam.

Pada saat yang tidak begitu jauh pertemuan yang akan dilaksanakan di Mesir, tentu sangat mempengaruhi pertemuan Umat Islam yang dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 1920. Tentu banyak yang akan mengambil kesempatan dari pertemu konres tersebut karena berbagai persoalan dibahas dalam kongres tersebut dan sangat rentang terjadi kudeta. Itulah sebabnya banyak tokoh mengkhawatirkan sehingga perlu dilaksanakan secara hati-hati demi tercapainya keutuhan umat Islam. Namun demikian, peran aktivis, pemuda dan Ulama selal mengambil peran agar terjadi kesamaan persepsi sekalipun kaum modernis selal mendominasi.

Pertemuan yang dilakanakan pada tahun 1924 tema hagat yang diangkat adalah system khalifah sebagai wujud dari refresentasi umat Islam dalam model system kepemimpinan. Dari berbagai peserta yang hadir tentu mewakili organisasi keagamaan sebagai bentuk penyaluran aspirasi mulai dari Muhammadiyah, kaum intelektual sampai kepada perwakilan dari kaum tradsional. Namun rencana perteman tersebut tidak jadi dilaksanakan karena mengalami enundaan. Ketika hendak dihelat pertemuan pada tahun 1925 maka seketika terjadi pla pertemuan yang diselenggarakan di Arab Saudi. Hanya saja terjadi perdebatan karena Mesir juga hendak menggelar hajatan yang sama sehingga terjadi perdebatan dari berbagai organisasi mulai dari SI, Muhammadiyah dan kaum tradisionalis. muhammadiyah, dan kaum tradisionalis.

Gerakan kelompok Muhammadiyah sejak awal tampak lebih cenderung ke kongres kairo, akan tetapi pemimpin sarekat islam cokrominoto keberatan atas pemimpin raja fa'ad dalam pertemuan ini, yang dia curigai sebagai siasat tersembunyi inggris untuk menguasai dunia islam. Dia menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia, demi alas an politik hendaknya memilih kongres Mekkah yang diadakan Ibnu Sa'ud. Kaum tradisionalis juga memilih mekkah, walaupun dengan alasan yang berbeda: keberadaan hijaz bagi mereka merupakan masalah yang lebih penting dari pada semua permasalahan kepemimpinan.

Kelompok tradisional menginginkan agar rencana pertemuan yang akan dihelat di Arab Saudi harus memberikan jaminan agar Mazhab-mazhab yang dipakai di Indonesia tidak di intervensi oleh pihak kerajaan. Dimana Indonesia sudah mempedomani mazhab dari klangan syafi'I yang notabene banyak di ikuti oleh kalangan tradisional dan sudah sejak lama mempraktekannya. Bahkan mereka meminta eksistensi ketradisonalnya dapat dipertahankan dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak Arab Saudi. Karena mereka berpendapat bahwa dengan eksis pada ke tradionalnya dengan mzhab syafi'I membuat ke ulamaannya di Indonesia semakin kokoh. Jaminan inilah yang harus dipegang oleh mere dari pihak kerajaan

agar paham-paham keagamaan dengan corak khasnya tidak termarginalisasi. Masih banyak lagi ajaran yang ditolak diwilayah tersebut selama dapat merusak aqidah umat Islam. Diantaranya tidak dibolehkan muncul berbagai paham tarikat dan melakukan ziarah kubur yang dianggap suci bagi kaum tradisional sehingga dapat meniadakan mendapatkan keberkahan.

Keagamaan kelompok revalis Islam Indonesia untuk mewakili aspirasi kelompok tradisional pada kongres Mekkah, mendorong KH. Wahab Hasbullah untuk mengorganisir ulama terkemuka Jawa Timur yang tergabung dalam *taswirul afkar*, agar mengutus perwakilan dari kalangan mereka menuju kongres Mekkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan fatalisme bermazhab dengan pihak kerajaan. Untuk tujuan ini kemudian mereka mendirikan sebuah perkumpulan, yang kemudian disebut perkumpulan *hijaz*, dan menetapkan untuk musyawarah penentuan utusan di rumah KH. Wahab Hasbullah di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Untuk lebih kuat memperkuat image pihak luar, maka Komite ini kemudian mereka mendirikan sebuah persatuan yang disebut sebagai *Nahdatul Ulama (NU)*.

Ciri khas sebuah pesantren dapat diidentifikasi dari adanya tempat menginap bagi santri di dalamnya terdapat sebuah masjid untuk menjalankan ibadah bagi santri. Namun pada biasanya kalau santri bermukim di dekat pesantren, mereka tidak menginap akan tetapi kembali kerumahnya karena berjarak dekat. Biasanya hanya santri senior yang tinggal menetap di pesantren. Bahkan orang tua mereka mendorong untuk tinggal di pesantren. Pembiayaan pesantren bersumber dari pembayaran santri, aktifitas pertanian dan perdagangan kecil-kecilan yang dilakukan oleh para kiyai, dan sebagian bersumber dari luar seperti simpatisan dan pengikut setia para kiyai yang kaya.

Dari beberapa pesantren yang muncul, mulai dari yang paling sederhana yang hanya mengajar tentang kaifiyat kosa kata Arab kemudian dihafal sebagian atau seluruh yang terdapat dalam Alquran. Yang lebih tinggi lagi adalah santri diajar oleh Ustadz dengan berbagai referensi sebagai bahan pembelajaran nahwu sharaf, buku tasawuf, kajian tafsir dan masih banyak lagi yang lain yang dapat memperkaya khazanah keilmuan santri. Referensi tersebut menjadi acuan utama dalam belajar agar dapat mendalami ilmu agama sekaligus menjadi identitas pesantren. Disamping itu, ilmu pengetahuan umum juga menjadi obyek kajian di pondok pesantren supaya dapat mengkombinasikan antar dua kurikulum. Hanya saja, sebuah pesantren memiliki identitas pribadi sebagai pembeda dengan lembaga pendidikan yang ada di bumi Nusantara.

Dua kelompok yang sangat getul bertentangan dengan kaum tradisional yaitu modernid dan reformis elalu mempertentankan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan karena berlawanan dengan ajaran Islam menurut paha mereka bahkan kedua kelompok tersebut berani membid'akan kelompok tradisional. Bahkan kaum revival berusaha keras melawan kaum tradisional mlalui budaya yang dikembangkan. Sehingga kedua paham tersebut sangat sulit untuk dipertemukan dalam pemahaman keagamaan.

masukan tajam yang dilontarkan oleh alangan revival adalah bentuk tradisionalisme yang sering dilakukan terutama paham agama yang sering dikerjakan baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kelompok revival selalu tidak mengaitkan lagi amalan yang seseorang apabila sudah meninggal sehingga paham mereka tidak ada lagi bentuk komunikasi dikalangan mereka bahkn lebih tegas lagi mereka membid'akan perbuatan tersebut misalnya kegiatan tahlilan yang dapat mengarahkan umat Islam kepada penyelewengan aqidah. Tentu paham tersebut sangat bertentangan degan paham tradisional yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama melalui pemahaman tradisional yang mereka lakukan.

Pemahaman tekstualisasi seorang kiay yang berkaitan dengan persoalan fiqh dalam mengembangkan wawasan pengetahuan tradisional tidak berhenti mendapatkan perlawanan dari kalangan revivalis yag menganggap fiqh sebagai bentuk bid'ah dari persoalan yang dikemukakannya. Bagi mereka, membentuk fiqh tradisional tidak lain dari memperkuat pemahaman taklid saja dari persoalan hokum yang telah dikemukakan oleh para Imam mazhab. Mazhab syafii misalnya tidak lain merupakan dari pemahaman tentang hasil kajian syar'I dan ide-ide tentang karya paralmam pada abad pertengahan yang dapat menjadi penghalan munculnya gagasan pada abad modern dengan yang terjadi pada masa Nabi saw. Sehingga tidak jarang dikalangan mereka tidak menerima paham tentang thariqah, tasawuf, aqidah, karena mereka lebih mengacu pada filsafat yang dikembangkan oleh orang Yunani dan sebagian pemikir dari Romawi.

Dikalangan ulama salafi munculnya berbagai masukan merupakan antitesa terhadap pemahaman tentang Islam dan merupakan pertanyaan bagi eksistensi seorang Kiay dalam memegang kekuasaan di bidang keagamaan. Munculnya pembelaan terhadap ulama-ulama salafi merupakan sebagai perlawanan untuk mewujudkan eksistensinya dalam mempertahankan tradisi yang mereka kembangkan agar tidak mudah pudar.

## 2. NU dan Dinamika Politik di Indonesia.

Menelusuri lebih dalam tentang sejauh mana kiprah gerakan dan pemikiran NU dalam dinamika gerakan politik dan pemikiran Islam di Indonesia, meniscayakan pembacaan menyeluruh tentang semua perkembangan NU dalam tahapan sejarah hingga bentuknya yang terakhir sebagai lokomotif gagasan pos tradisionalisme Islam di Indonesia, yang kiranya mulai terbuka sejak dekade 1980-an. Hal ini terjadi sebab banyak dari kalangan aktor tahun 1980, tetap merujuk model dahulu kala yang dapat menjadi legitimator dalam berbagai pemikiran yang hidup dan berkembang hari ini, maupun sebagai pengalaman buruk yang harus ditarik hikmahnya.

Sejak tahun 1980-an NU telah menarik perhatian yang cenderung meningkat. Mewakili kepentingan ekonomi dan keagamaan, NU segera menjadi organisasi penting yang anggota anggotanya terdiri dari para petani, pedagang, pegawai negeri, dan politisi dari latar belakang yang berbeda. Meskipun pendukung NU terutama dari masyarakat pedesaan, searah dengan tumbuhnya masyarakat perkotaan, menyebabkan penyerapan organisasi tersebut terhadap masyarakat kota cenderung meningkat. Dan sejak tahun 1984, NU eksis di atas kendali kepemimpinan gabungan antara ulama dan intelektual.

Perpolitikan Nahdatul Ulama (NU), sering dipandang berawal pada 1952, ketika organisasi ini memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi parpol sendiri. Mulai saat itu, secara penuh NU terlibat dalam kegiatan-kegiatan dan proses-proses politik, disamping masih melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Hal demikian berlangsung hingga tahun 1973, ketika ia dipaksa harus berfusi ke dalam organisasi baru, PPP. Maka identitasnya sebagai parpol secara otomatis di tanggalkan, dan berbagai semula. Namun faktanya kepolitikan itu berlangsung hingga 1984 karena pada kurung waktu ini ia secara penuh masih terlibat di dalam PPP. Fusi di dalam PPP masih belum tuntas karena kepentingan unsur masih menonjol. Baru pada muktamanya yang ke-27, di Situbondo, 8-12 Desember 1984. NU menyatakan secara resmi meninggalkan kegiatan-kegiatan politiknya, dan secara penuh hendak kembali ke jam'iyah diniyah. Adanya priorisasi kepolitikan secara ini 1954-1984 dipengaruhi oleh penglihatan perubahan actual otoritas yang ada di dalam tubuh NU. Pada periode ini para politisi memiliki peran berlebih mengatur dan menentukan arah organisasi dibandingkan para kiyai.

Pandangan seperti ini tidak sepenuhnya tepat, karena pada kenyataan kepolitikan ini (kegiatan-kegiatan politik yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan sistem politik) telah terlihat pada saat ia berdiri, dan masih terlihat pada tahun-tahun setelah kembali

ke khitbah 1926. Pada awal berdirinya kepolitikan NU memang kurang tampak jelas. Pada masa itu organisasi islam ‘pembaru’-lah yang lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, terutama sarekat islam. Hal ini terjadi karena pada awal-awal berdirinya NU lebih banyak bergerak di bidang social keagamaan. Perbincangan dari muktamar ke muktamar lebih tercurah pada masalah-masalah keagamaan dari pada persoalan-persoalan politik. Namun ada sikap satu dari para kiyai NU, yang menunjukkan dirinya secara tidak langsung terlibat dalam kepolitikan. Yakni sikap kiyai yang tidak kooperatif terhadap belanda. Sikap nonkooperatif ini terlihat dar “larinya” para kiyai ke pedalaman guna mempertahankan dan mengembankan nilai-nilai keagamaan yang di anut. Dan di pedalaman di pesantren-pesantren yang di dirikan, terdapat penumbuhan semangat sosialisme di kalangan santri. Secara tidak langsung, hal ini merupakan upaya sosialisme terhadap para santri untuk melawan belanda. Pemberontakan-pemberontakan di pedesaan juga melawan belanda, seperti pemberontakan petani Cirebon, merupakan perilaku aktual dari kesadaran nasionalisme.

Ketika belanda memberikan kesempatan pada pribumi terlihat secara langsung dalam proses politik, lewat volskraad, yang didirikan pada tahun 1918, beberapa organisasi menempuh jalan kooperatif untuk memasuki lembaga yang dipandang sebagai tempat wakil rakyat. Dari golongan Indonesia antara lain: budi utomo, sarekat islam, sarekat sumatera, pasundan, malukschpolitiek verbund, kaum minahasa, kaum betawi. Sampai lembaga perwakilan rakyat ini dibubarkan setelah jepang menduduki Indonesia, NU tidak pernah ada di dalamnya, meskipun ia pernah ditawarkan. Pada muktamar ke-13, 11-16 Juni 1938, di Banjarmasin, sebenarnya ada pemikiran menempatkan wakil NU di volksraad. Namun pemikiran ini pada akhirnya mentah kembali karena mayoritas peserta muktamar menolaknya. Dari 58 peserta yang turut mengambil keputusan, 54 diantaranya menolak.

Kalau kegiatan-kegiatan politik dipandang sebagai keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam struktur-struktur politik yang memiliki otoritas dalam pembuatan keputusan-keputusan politik yang mengikat masyarakat, barangkali langkah-langkah NU itu islam bukan termasuk kegiatan politik. baru setelah ia bersedia duduk di dalam struktur politik pada masa pendudukan jepang saja barangkali bisa dimasukan sebagai kategori berimplikasi politik pada struktur politik sebenarnya termasuk kategori nasionalisme dan perilaku kagamaan yang cenderung non kooperatif terhadap belanda. Kepolitikan NU secara umum dapat di analisis dengan dengan tiga topic utama: *pertama*, kepolitikan NU selama bergabung dengan masyumi (1945-

1952), *kedua*, kepolitikan NU ketika menjadi parpol (1952-1937), *ketika*, kepolitikan NU ketika fisi dalam ppp, (1973-1984).

Ketik Wakil Presiden Muh. Hatta mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 Novemver 1945 seakan memberi sinyal bagi masyumi untuk membentuk partai politik sekaligus sebagai sinyal adanya kemenangan bagi kelompok pemuda supaya ide pluralitas dan bebas membentuk partai politik. Pada tanggal 23 Agustus 1945 preside Soekarno juga sudah memberi sinyal adanya gagasan tersebut supaya segera dibentuk hanya saja partainya bersifat tunggal yaitu PNI saja. Tujuan yang ingin dicapai adalah supaya terwujud persatuan dan kesatuan bangsa. Di satu sisi Soekarno juga menghendaki adanya parai pelopor sebagai tantangan adanya kebebasan yang digagas oleh Muh. Sahri pada sisi lain. Dengan adanya partai politik maka tentu ide dan saran bias disalurkan melalui partai politik tersebut. Dengan alasan polaritas, soekarno tentu mengembangkan adanya nasionalisme, marxisme, islamsme supaya jangan ada partai yang hanya memonopoli kemandirian partai saja dengan mengabaikan adanya partai-partai lain.

Sikap antusiasme dperlihatkan kaangan Islam ketika kelompok-kelompok membuat parati politik sebagaimana amanah konres umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7-8 november 1945. Yang dikemukakan dalam kongres tersebut adalah. Dalam kongres tersebut mencuat issu untuk membentuk partai politik dari kalangan NU. Adapun keputusan yang dihasilkandalam pertemuan tersebut adalah pembentukan masyumi sebagai gerakan partai politik sekaligus sebagai representasi umat Islaam yang mewakili dalam kanca perpolitikan. Dari gagasan tersebut tentu NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi keislama tentu angkat setuju dengan pembentukan tersebut.

Kegiatan politik NU kian jelas manakala ia bersama organisasi keagamaan jenisnya membentuk masyumi (yang lai dari masyumi bentukan jepang) setelah Indonesia merdeka. Keanggotaan masyumi yang pertama adalah: NU, muhammadiyah, perserikatan ulama islam, dan persatuan ummat islam. Pada priode berikutnya keanggotan masyuma bertambah dengan bergabungnya organisasi keagamaan islam yang lain, seperti: al-irsyad, al-jamytul wasliyah, persatuan islam. Yang menjadi anggota biasa lewat dua jalur: secara individual dan secara organisasi. Cara keanggotaan seperti inilah dikemudian hari yang di persoalkan NU, dan menjadi salah satu factor penyebab NU keluar dari Masyumi.

Secara kolektif, dapat terbagi dalam dua kepemimpinan, yaitu pertama; pengurus partai dapat dikatakan sebagai pengurus eksekutif. Dalam tugasnya, menjalankan roda partai setiap hari. Dari kelompok ini dapat melahirkan kelompo pembaharu dikalangan mereka yang dapat

meneruskan pergerakan organisasi. Kedua; majelis syura hanya menyelesaikan persoalan keagamaan. Adapun berbagai tokoh dan ulama dapat menjadi bagian darinya. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil tidak boleh berjalan sendiri akan tetapi harus di musyawarahkan terlebih dahulu untuk menghasilkan kesepakatan.

Struktur kepemimpinan yang telah dikemukakan menurut para intelektual masyumi dinilai penhalangt laju perkembangan partai. Banyaknya masalah yang berkaitan dengan agama, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Syuro. Padahal menurutnya, partai harus berjalan cepat. Untuk itulah pada muktamar masyumi yang ke-4, 15-19 desember 1949, di Yogyakarta, di usulkan kemudian ditetapkan perubahan AD/ART. Di dalamnya mencakup perubahan fungsi dan tugas majelis syuro. Pada wal dibentuknya, dewan syora merupakan jbatan tertinggi dan kebijakan yang diambil sangat mengikat ara anggotanya. Namun seteelah terjadi pergantian, kedudukannya hanya sebagai penasehatdan tidak bias mengambil kebijakan strategis sehingga keputusan untuk mempeto tidak diakui lagi. Nasehatnya tidak wajib dilaksanakan. NU sealu menganggap tidak ada lagi keuntungan yang diperoleh sehinga mereka pun melakukan protes karena sangat merugikan bagi organisasi hanya saja apa yang sdisampaikan tidak membuahkan hasil. Itulah sebabnya NU keuar dari keanggotaan dalam organisasi masyumi. Maka dari situlah NU berubah haluan dari organisasi keagamaan menjadi organisasi politik.

Di bentuknya NU sebagai partai politik, merupakan suatu perjalanan awal. Meskipun ia telah belajar berpolitik di masyumi, tetapi langkahnya ini akan membawa peran baru. Kiyai menurut cholid mawardi telah lama tersingkir dari peraturan politik, mulai saat itu akan terlibat langsung dalam permainan politik. Dalam rangka mencari solusi dari berbagai problem yang ditemukan, NU menerima tenaga-tenaga handala dalam menelesaikan masalah, yang tentu saja tidak asal comot, karena mereka haruslah menganut aliran ahlusunnah waljamaaah. Tenaga muda ini amat perlu, karena setelah NU menjadi NU menjadi parpol, program pelaksanaan pemilu telah di rancang.

Meskipun pemilu merupakan salah satu harapan dari NU, tetapi pelaksanaanya yang relative dekat dengan pembentukannya sebagai parpol, membuat persiapan organisasi ini menjadi kurang bila di bandingkan dengan masyumi misalnya. Karena pada awal-awal pembentukannya sebagai partai, yang banyak di lakukan adalah membenahi intern organisasi, terutama menutupi kekurangan-kekurangannya selama ini, seperti kurangnya tenaga professional. Nafas NU sebaga jam'iyah diniyah sendiri masih Nampak. Hal ini terlihat pada muktamarnya yang ke-20 di 8-

13 september di Surabaya. Persoalan diniyah masih dominan di perbincangkan, meski sudah mulai bergeser. Dalam muktamar ini misalnya, sudah diperbincangkan strategi yang dipakai dalam menghadapi pemilu 1955. Bagi NU pemilu, pemilu pertama ini amat penting. Lewat pemilu inilah, NU bisa menunjukkan bahwa dirinya besar (kepada masyumi). Dipihak lain lewat pemilu ini pula NU akan mendudukkan orang-orangnya kedalam konstitusi, yang didalam wadah wakil rakyat itulah akan di diskusikan persoalan yang paling mendasar bagi bangsa Indonesia, yakni dasar Negara.

Untuk melapangkan jalannya strategi parpol, NU mengawali kiprahnya dengan sebuah kebijakan strategis dengan ikut dalam kabinet Ali Wongso-Zaenal (PNI-PIR-NU), hal ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi politiknya, juga untuk mengimbangi ofersifitas politik masyumi. Dalam kabinet ini NU memperoleh tiga kursi, yakni Zainal Arifin sebagai wakil pertama menteri 2, KH. Masykur, sebagai menteri agama, dan Muhammad hanafiyah sebagai menteri agraria. Pada kabinet ini, tidak seorangpun dari masyumi yang duduk didalamnya.

Pada masa priode Burhanuddin Harahap (pengganti Ali) NU juga bagian yng ada di dalamnya, walaupun masih berada disekitar oleh suasana pertentangan dengan masyumi. Dua orang NU menempati urutan ketiga, atau masuk dalam kementerian, yakni; Mr. Sunaryo sebagai menteri dalam negeri, dan K, H Ilyas sebagai menteri agama. Keikutsertaan NU dalam kabinet ini, menurut cholid nurwadi hanya untuk menjaga agar pemilu dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

Pemilu akhirnya dilaksanakan tepat pada waktunya tahun 1955, dan diluar dugaan NU menempati urutan ketiga atau masuk dalam empat besar di bawah PNI dan masyumi, dengan perolehan suara PNI, 8.434.653. (22,3%) dengan perolehan 57 kursi, masyumi, 7.903.886 (20,9%) dengan perolehan 57 kursi, NU, 6.955.141 (18,4%) dengan perolehan 45 kursi, lain-lain 8.314.705 (22%) dengan perolehan 59 kursi. Karena tidak dapat partai dominan, kabinet yang di bentuk kemudian adalah kabinet koalisi: PNI-Masyumi-NU, PKI yang di usulkan oleh presiden soekarno agar turut dalam kabinet koalisi di tolak oleh masyumi dan NU. Polarisasi ideology antara keduanya sebagaimana di gambarkan oleh feth dan carles begitu tajam sehingga tidak mungkin menyatu.

Beriring dengan perolehan susunanya dalam pemilu, kedudukan NU kian kuat. Kalau dalam kabinet burhanuddin harahap, kelompok nahdliyyin mendapat jabatan dalam susuna kabinat, ali sastromidjoyo II NU memperoleh lima kursi kementerian, yakni K.H Idham Chalid selaku wakil perdana menteri II, Mr. sunaryo diangkat menjadi menteri dalam negeri, Mr. burhanuddin sebagai menteri perekonomian, K.H. Fatah Yasin sebagai menteri social, dan K.H.M. Ilyas, dilantik

menjadi menteri agama. Masyumi sendiri dalam kabinet Aii-rum\_idham ini, memperoleh empat kursi kementerian.

Dalam beberapa kasus perbedaan antara Masyumi-NU memang sepertinya sulit terjembatani. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, mereka justru bisa berpadu. Di dalam sidang konstitusi yang membahas dasar Negara misalnya antara Masyumi dan NU, bahkan hampir seluruh wakil-wakil partai islam, berada dalam satu kelompok. Mereka sama-sama memperjuangkan islam sebagai dasar Negara Indonesia. Mengingat presentasi hasil pemilu 1955, partai-partai islam hanya memperoleh suara 45,2%, mengakibatkan “pertarungan” dalam sidang-sidang konstitusi pada pembahasan tentang dasar Negara menjadi alot dan berlarut-larut, dan akhirnya atas dukungan militer\_nasution\_presiden soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959, yang terpenting dari dekrit ini adalah diberlakukannya kembali UUD 1945, dan dibubarkannya konstitusi, sekalipun merupakan titik awal dari demokrasi terpimpin soekarno.

Menghadapi babak baru ini, kekuatan politik Islam terpisah menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang menolak dan yang mendukung. Yang pertama, masyumi menilai sistem politik demokrasi terpimpin itu otoriter. Dalam sistem demikian, menurut masyumi merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran islam. Yang kedua, NU, PSII, dan perti, yang bergabung dalam liga muslimin, menilai bahwa dukungan atas sistem ini sebagai sikap yang realistis dan pragmatic, kebijaksanaan dan musyawarah. Bahkan lebih dalam, ketika presiden membubarkan DPR hasil pemilu pada tahun 1960, sebagai akibat penolakan DPR terhadap RAPBN, NU masih tetap terlibat dalam DPRGR bentukan presiden soekarno.

Kolaborasi yang kuat antara NU dan soekarno, dalam pandangan yafi'I ma'arif, Karena adanya aliansi antara dua sub kultur politik polemistik yang di anut oleh NU dan soekarno. Sukarno merupakan penganut sub kultur jawa tentang hubungan “bapak-anak”. Sub kultur ini hendak dimanifestasikan ke dalam hubungan keluarga besar bangsa Indonesia. Sementara itu NU menganut islam paternalistik sebagai sub kulturalnya. Dalam hubungan inilah sukarno dan NU berkolaborasi. Dalam menyatukan NU, sukarno hanya rangkul beberapa kiyai senior. Maka dari itu, NU sebagai organisasi besar yang bergerak menjunjung kemanusiaan, maka Soekarno dijadikan bagian tak terpisahkan agar tujuan politiknya dapat tercapai.

Hanya saja, pola hubungan seperti ini memudar, seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Revolusi 30 september 1965 yang gagal dilakukan oleh letkol untung sutopo, kemudian cakrabirawa dan melibatkan PKI di belakangnya, telah mengubah cocok dan warna kehidupan politik Indonesia. Jaringan sistem politik demokrasi terpimpin yang menampilkan pilar-pilar kekuatan politik yang berpusat pada militer-soekarno-PKI, bersama-sama dengan peristiwa itu ikut memudar.

Surutnya dua kekuatan penyangga demokrasi terpimpin, Sukarno dan PKI, telah menghantarkan kekuatan ketiga: militer, sebagai satu-satunya pemimpin politik terkuat di panggung politik. Yang kemudian dengan sukses mengantarkan jenderal Suharto mengambil alih kepemimpinan dari tangan Sukarno, melalui SUPERSEMAR yang kemudian dilakukan secara legitimet menjadi penjahat presiden melalui ketetapan siding istimewa MPRS No. XXXIII/MPRS/1976, dan kemudian dilakukan menjadi presiden defenitif setahun kemudian melalui ketetapan MPRS tahun 1968.

Pada masa orde baru, berdirinya NU sebagai organisasi keagamaan mendapatkan banyak tantangan bahkan tidak sedikit yang menaruh kecurigaan karena dikhawatirkan munculnya gerakan yang dapat menentang pemerintah. Dengan adanya gerakan kepemudaan yang digalakkan oleh Anshar setidaknya dapat memberi kepercayaan sehingga NU dengan mudah dirangkul untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah. Gerakan kepemudaan NU memberikan angin segar sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik. Beberapa di antaranya adalah; kiyai Dahlan, Subhan ZE, Ahmad Sijchu, dan KH. Idham Chalid.

Kehangatan Orde Baru terhadap NU tidak berlangsung lama, terutama ketika Presiden Soekarno melalui Ali Murtopo dan Amir Mahmud serta kekuatan fungsionalnya memaksakan kemenangan Golkar pada pemilu orde baru yang pertama yang diselenggarakan pada tahun 1971, yang kemudian disikapi dengan sangat kritis oleh tokoh-tokoh NU, terutama Subhan ZE. Pemilu 1971, merupakan sebuah kesempatan untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap rezim baru. Dari berbagai partai politik yang ada pada waktu itu, kaum Nahdliyyin mengambil sikap kritis dalam rangka menghadapi pemilu. Disaat hendak melakukan kampanye, tentu mengambil sikap tegas dan keras demi untuk meraih suara umat Islam terutama dari kaum tradisional. Maka dilakukanlah langkah kritis dari berbagai tokoh partai politik misalnya Amir Mahmud dan Ali Murtopo. Pada saat berkampanye ditemukan berbagai intimidasi dari kalangan TNI bahkan pemerintah juga memberi tekanan supaya memilih Golkar sebagai partai representasi bagi pemerintah. Dan hasil akhir dari pemilu tersebut menempatkan Golkar sebagai pemenang mutlak dengan meraih 62,8% suara. Sementara NU di urutan kedua dengan perolehan suara 18,7% suara.

Proses depolitisasi orde baru terus berjalan pada tahun 1973, program penataan kehidupan politik yang dilakukan pemerintah memaksa partai-partai Islam fusi. Bagi NU, fusi ke PPP dipahami seperti kembali ke masa dimana ia kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dapat diramalkan sebagian problem dan konflik lama muncul kembali kemurnakan, dan selanjutnya semakin diperparah oleh campur tangan pemerintah dalam mekanisme dan struktur partai.

Kondisi tersebut mencapai puncaknya ketika pada tahun 1978 PPP melakukan tindakan "walk out" pada saat pembahasan GBHN tentang aliran kepercayaan, menyebabkan kemudian kemudian pengurus pusat NU mintareja

dipecat sekaligus mengangkat Djaelani Naro untuk menggantikannya dengan tidak dilakukan lagi musyawarah dengan pengurus-pengurus lainnya. Bahkan lebih mengejutkan lagi ketika Naro mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 1982 dan ini dilakukan juga tanpa musyawarah sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap pengurus lainnya. Dimana proposisi anggota NU yang vokal seperti: Yusuf Hasyim, Saffuddin Zuhri, dan Imran Rasyid di letakkan pada nomor urut paling bawah, sehingga mereka tidak mungkin terpilih.

Namun demikian, kelompok NU tentu memperlihatkan jati dirinya sebagai organisasi sehingga harus mengambil sikap antara ikut pemerintah atau menjadi oposisi. Dengan pemaksaan atas tunggal Pancasila dalam berorganisasi dan bernegara. Pada saat itu NU harus mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau setidaknya memberi dukungan. Maka dapat dikatakan bahwa NU tidak lagi mengambil peran oposisi akan tetapi menjadi pendukung pemerintah. Keputusan yang diambil di Situbondo merekomendasikan agar NU tidak lagi berperan aktif dalam politik praktis dan kembali kepada khittahnya sebagai organisasi keagamaan dalam rangka memperjuangkan aspirasi umat Islam. Disamping itu, menjadikan Pancasila sebagai asas dalam bernegara. Kedua keputusan tersebut tentu mendapat respon dari berbagai kalangan bahkan lebih mempermulus kedudukan Abdurrahman Wahid menduduki jabatan sebagai ketua NU.

Pada saat tokoh NU dan alim ulama berkumpul di Situbondo pada tahun 1984-1984 disepakati adanya penyamaan persepsi dengan pemerintah agar NU kembali ke khittahnya menjadi sebuah gerakan keagamaan. Namun bukan berarti menolak adanya Pancasila sebagai dasar beragama akan tetapi memberi dukungan kepada pemerintah untuk melakukan kerjasama dalam membangun negara kesatuan. NU lahir demi memperjuangkan kepentingan masyarakat bukan untuk memperjuangkan kepentingan perseorangan apalagi golongan. Hanya saja dalam kurun waktu tertentu NU bukan hanya lahir sebagai gerakan organisasi keagamaan akan tetapi menjadi sebuah gerakan politik. Mereka selalu berpaham bahwa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatnya, maka harus selalu berafiliasi dengan pemerintah.

### **3. NU dan Transformasi Pemikiran Islam di Indonesia**

Gerakan transformasi pemikiran di lingkungan NU ditandai dengan kelahiran kaum tokoh generasi muda NU yang melakukan pembaruan wacana dan gerakan. Kelahiran ini didahului dengan prakondisi di dalam organisasi, setelah NU kembali ke khittahnya, maka harus konsisten dengan perjuangan dengan mengusung konsep keagamaan dan jauh dari intrik politik. NU dideskripsikan sebagai wadah pembentukan intelektualisme yang dapat melahirkan cendekiawan Muslim.

Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh pemuda NU adalah rutinitas dalam melakukan kajian ilmiah sehingga mereka dapat menjadi pembaharu-pembaharu

dalam melihat perspektif Islam secara luas. Gagasan pemikiran mereka dituangkan dalam satu jurnal kajian ilmiah atau dalam bentuk makalah agar paham mereka dapat tersosialisasi di masyarakat dan dapat menjadi bagian internalisasi masyarakat supaya mengakar dengan ajarannya. Tidak sedikit diantara mereka mempublikasikan hasil karyanya bahkan mendirikan lembaga studi keagamaan hingga mendirikan lembaga-lebaga kepemudaan agar aspirasi mereka dapat tersalurkan.

Tampilnya Gusdur dan KH. Ahmad Siddiq, merupakan bagian dan penting dari kampanye pembaruan dalam NU. Keputusan kembali ke Khitbah 1926, banyak didorong oleh sejumlah gagasan dan pemikiran Gusdur dan KH. Ahmad Siddiq yang di dukung oleh kiyai-kiyai muda dan generasi muda NU. Hefner memilih khitbah 1926 bisa dianggap sebagai kekuatan moral yang mampu mempengaruhi politik nasional dengan cara agama. Keluar dari partai politik bagi Gusdur merupakan peluang untuk mempergunakan pengaruh kemana saja. Parpol, ABRI, LSM, dan sebagainya. Menurutnya keluar dari partai politik bukan berarti kemunduran tetapi sebagai peralihan ke militansi yang lebih efektif, meski tidak melalui partai politik. Kecerdasan dan kecakapan Gusdur dan KH. Ahmad Shiddiq merupakan sumbangan besar bagi proses perubahan dan pembaruan dalam NU.

Pembaruan wacana dan pemikiran dalam NU menjadi beberapa topik yang terkait dengan masalah keagamaan, kemasyarakatan, kebanggaan, dan global, sebagai kritik atas pembaruan lama di kalangan Nahdiyyin, diantaranya [1] menggugat ortodoks ahlusunnah waljamaah, membongkar konservatisme dan menyegarkan kembali pembaruan Islam. [2] Islam sebagai agama universal dan lokal, mengkritisi pembaruan izma bahwa islam adalah ajaran universal, [3] membangun syarah demokratik, mengkritisi pembaruan lama bahwa syariah bersifat dogmatis yang harus diterima apa adanya. [4] fiqih sosial dan tekstual menuju kontekstual, mengkritisi pandangan lama bahwa fiqih social harus merujuk pada teks-teks agama. [5] liberalisasi wacana mendepak konservatisme, kritik atas pandangan lama yang bersifat konservatif dan anti liberal.

Wacana tentang berbagai masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, diantaranya: [1] Islam Pribumusi ; Mencari wajah Islam Indonesia, mengkritisi pandangan lama yang mengidentikkan Islam dengan Arab atau Timur Tengah. [2] militerisasi; penguatan militer dan buka militerisme, kritik atas pandangan lama bahwa penguatan masyarakat dengan militerisme dapat dibenarkan [3] involusi transisi demokrasi; kendala penegakan kedaulatan rakyat, kritik atas banyaknya kendala demokrasi yang kadang mendapat legitimasi ulama. [4] Kultur

Hibrida; Anak muda NU di jalur kultural, ungkapan generasi baru bahwa membangun NU tidak mutlak harus dengan tradisi pesantren.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah berdirinya NU pada tahun 1926 yang diprakarsai beberapa tokoh dan alim uama, maka banyak persepsi miring yang muncul dikawatirkan akan memunculkan suatu gerakan. Padahal tujuannya bukan untuk memecah belah organisasi keagamaan yang muncul sebelumnya yang mengusung gerakan reformis. NU lahir tidak lebih dari mempertahankan tradisionisme dan bukan berarti menengabaikan post tradisionisme. Perpolitikan NU secara umum dapat dianalisis dengan tiga topik utama: *pertama*, perpolitikan NU selama bergabung dengan Masyumi (1945-1952), *kedua*, perpolitikan NU ketika menjadi Parpol (1952-1973), *ketiga*, kepolitikan NU ketika bergabung dengan PPP (1973-1984).

Gerakan transformasi pemikiran di lingkungan NU di tandai dengan kelahiran kaum Nahdiyyin dari tokoh generasi muda NU yang melakukan pembaruan wacana dan gerakan. Kelahiran ini di dahului dengan prakondisi di dalam organisasi, kembalinya NU ke khitbah 1926 pada tahun 1984. Kembali ke khitbah berarti NU harus kembali menjadi organisasi sosial keagamaan dan tidak lagi berhubungan dengan politik. Kondisi ini menjadikan generasi muda NU tidak lagi sibuk dengan kegiatan politik, tetapi beralih kepada kajian-kajian ilmiah, penelitian, dan aksi sosial.

Sebagai organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia aka disarankan agar mengambil peran yang lebih strategis lagi supaya dapat memberi sumbangsi pemikiran demi kelanjutan dalam proses berbangsa dan bernegara. Melalui gerakan tradisionisme yang dimiliki supaya NU dapat lebih mengembangkan nilai-nilai budaya dimiliki sehingga mampu adaptip terhadap persoalan-persoalan kekinian dengan tidak membuang budaya tradisionism yang sudah berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aboebakar, 1998, *Sedjarah Hidup KHA Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar* (Djakarta: Panitya Buku Peringatan Alm. KHA Wahid Hasjim).
- Ali, M. Haidar, 1994. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, A Saifullah, 985, *Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor* (Jakarta: LP3ES).
- Alfian,1983. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Gramedia: Jakarta.

- Amin, Samsul Munir, 1996, *NU dan Perjuangan Nasional*: Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Andre'e Fellard. 2008. *Islam et Annee dons'indonesie contcmporaine les pionniers de la Tradition*, diterjemahkan oleh lesmana, NU vis a vis Negara, pencarian isi, bentuk, dan makna, Cet..II, Jogyakarta.
- Arif, Mahmud, 2008. *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKIS).
- Asy'ari, Muhammad Hasyim, 1998, *Adāb al-Ālim wa al-Muta'alim* (Jombang: Maktabah alTurats al Islami).
- Azra, Azyumardi, 2014 "*libralisasi pemikiran NU*", dalam mujammil Qamar, NU "*liberal*" dari *Tradisionalisme ahlusunnah ke universalisme islam*, Bandung : Mizan.
- \_\_\_\_\_, Azyumardi, 1999, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Basori, Ruchman, 2006, *The Founding Father Pesantren Modern Indonesia*, Jejak Langkah K.H.A. Wahid Hasyim (Banten: INCEIS).
- Bruinessen, Martin Van, 2016. *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS.
- Chalid, Mawardi, 2015. *prutica politica nahdatul ulama; mendayung di tengah gelombang*, (Yayasan Pendidikan Practica : Jakarta-Surabaya).
- Dawam, Ainurrafiq dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, 2005. Listafariska Putra, 2005) Jurnal Tarbiyah, Vol. 23, No. 2, Juli-Desember 2016 ISSN : 0854 – 2627 232.
- Dhofier, Zamakhsyari, 1985, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta, LP3ES.
- Hamalik, Oemar. 2004. *Proses Belajar Mengajar*, Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, Oemar. 2003. *Proses Belajar Mengajar*. Cet. Ke III; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, Tholha dkk, 2010. *Konfigurasi Nalar Nahdlatul Ulama*, Cet. I; Malang: Jawa Timur: Pustaka Iqtishad.
- Hasbullah, 1995, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Herbert, Faith dan Lane Castles, 1988, *pemikiran politik indonesia 1945-1965*: Jakarta LP3S.
- Jeanne H. Ballantine. 1993. *The Sociology of Educatioan: A Sistematic Analysis*, New York: Prentice Hall.
- Karim. A. Gafar, 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia* :Yogyakarta: Pustaka Pelajar LKIS.
- Maarif, Syafi'I, 1988, *islam dan politik di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga press.

- Marijan Kacung, 1992. *Quo vadis NU setelah kembali ke khithbah 1926*, Erlangga :Jakarta.
- Martin Van Bruinessan, 2005. *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: the Nahdatul Ulama and indonesia's new order politics. Factional conflict and the search for A New Discourse*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan judul, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana-Wacana Baru*, (Cet. V, LP3S : Yogyakarta.
- cholid mawardi, *prutica politica nahdatul ulama; mendayung di tengah gelombang, (yayasan pendidikan practica : Jakarta-surabaya, 1967)*,h.29.
- Muzadi, Abdul Muchith. 2007. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* Surabaya: Khalista.
- Muzadi, Achmad Hasyim dkk, 2009. *Profil Dan Direktori Nahdlatul Ulama Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Yellow Multi Media.
- Noer, Deliar, 1990. *Gerakan Modern Islam di Indoneia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_, Deliar, 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* Jakarta: LP3ES.
- Rahman, Fazlur, 2001. *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Ridwan, M. Nasir, 1993. "Pendidikan di NU antara Cita dan Fakta", dalam Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 2/201Edisi No. 5, Juli-Agustus.
- Ridwan, Nur Kholik, 2008. *NU dan Neoliberalisme*. Yogyakarta: LKIS.
- Rofangi, H.M., 2016 "Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama (Analisis Kritis Terhadap Sekolah NU di DIY)" Jurnal AN-NUR Vol. II No. 4, Februari.
- Shunhadji, Soleh, 2004. *Arus Baru NU, perubahan pemikirann kaum muda dan tradisionalisme k epos tradisionalisme*, (Cet. I: Surabaya;. JP Books.
- Saridjo, Marwan, dkk., 2016, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1979) JURNAL TARBIYAH, Vol. 23, No. 2, Juli-Desember ISSN : 0854 – 2627 233.
- Siddiq, Achmad, 2006. *Khittah Nahdiyyah* Cet. VI; Surabaya: Khalista.
- Sirozi, Muhammad, 2005. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sobary, Mohammad, 2010. *NU dan Keindonesiaan*. Cet. I; Malang: Jawa Timur.
- Suwito et.al, 2005. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Syaukani, Ahmad, 1997. *Perkembangan Pemikiran Modern dalam Dunia Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia.

- Turmudi, Endang, (Ed.), 2003. *Nahdlatul 'Ulama; Ideology Politics and The Formation of Khaira Ummah, The Central Board of The Ma'arif Education Institution of NU*. Yogyakarta: LKIS.
- \_\_\_\_\_Endang (ed), 2004. *Nahdlatul Ulama: Ideology, Politics and The Formulation of Khaira Ummah*. Jakarta: PP Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.
- Yusuf, Slamet Efendi, dkk. 1983. *Dinamika Kaum Santri, Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*. Jakarta : Rajawali.